

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu sentra peternakan sapi potong yang memiliki jumlah populasi ternak sapi yang cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang tahun 2023 yang mencatat total populasi sapi potong mencapai 18.778 ekor. Kecamatan Kuranji menjadi salah satu kecamatan yang menonjol dalam hal populasi ternak tersebut, dengan jumlah mencapai 6.559 ekor pada tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kuranji memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan sapi potong, baik dari sisi ketersediaan ternak maupun pelaku usaha peternakan yang tergabung dalam kelompok-kelompok peternak.

Dinas Pertanian Kota Padang pada tahun 2024 mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 hingga 2023, telah disalurkan bantuan pemerintah kepada lima kelompok peternak sapi potong di Kecamatan Kuranji. Bantuan tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan, termasuk APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota, dengan bentuk dukungan berupa bibit ternak, indukan sapi, serta sarana dan prasarana penunjang peternakan. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi ternak, memperkuat kelembagaan kelompok, serta mendorong kemandirian ekonomi peternak secara kolektif.

Salah satu skema yang cukup berperan dalam penyaluran bantuan ini adalah melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang, yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses dan kunjungan kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bantuan disalurkan dengan mengacu pada prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh dukungan anggaran tetapi juga oleh tata kelola kelembagaan kelompok peternak itu sendiri.

Berdasarkan data lapangan, terdapat lima kelompok yaitu kelompok Tuah Sakato, kelompok Pancaran Usaha, kelompok Serumpun Makmur Kampung jambak, kelompok Padi Rimbun dan kelompok Sepakat Baru. Penerima bantuan di Kecamatan Kuranji menghimpun 189 orang anggota dan mengelola sebanyak 86 ekor sapi potong. Variasi dalam jumlah anggota, klasifikasi kelembagaan, kapasitas produksi, serta status kepemilikan ternak mencerminkan dinamika internal masing-masing kelompok. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani (2022) pada Kelompok Tani Pancaran Usaha juga menunjukkan bahwa kelompok tersebut berada dalam kategori dinamis dengan persentase skor 92,4%. Tetapi, sebagian besar kelompok seperti kelompok Tuah Sakato, kelompok Serumpun Makmur Kampung jambak, kelompok Padi Rimbun dan kelompok Sepakat Baru masih berada pada tahap pengembangan dan menghadapi kendala dalam hal manajemen usaha dan pemeliharaan ternak. Tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok juga berbeda-beda, di mana kelompok yang memiliki kepemimpinan kuat dan solidaritas tinggi menunjukkan perkembangan lebih baik. Sementara itu, kelompok lain masih menghadapi kendala dalam koordinasi internal dan keterbatasan akses terhadap sumber daya serta pasar. Perbedaan kondisi ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas

program bantuan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian dan produktivitas kelompok peternak di Kecamatan Kuranji.

Keragaman ini mencerminkan bahwa masing-masing kelompok memiliki dinamika internal yang berbeda-beda. Dinamika kelompok, menurut Susetyo (2021), mencakup aspek struktur, norma, peran, dan interaksi antaranggota yang memengaruhi fungsi kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, jumlah ternak yang tidak proporsional dengan jumlah anggota dapat menjadi indikator adanya ketimpangan partisipasi atau lemahnya koordinasi internal. Sebagai contoh, kelompok Sepakat Baru yang telah berdiri sejak tahun 2004 memiliki 35 anggota, tetapi hanya mengelola 4 ekor sapi potong. Ketimpangan antara jumlah anggota dan jumlah ternak ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas partisipasi anggota dan mekanisme distribusi peran dalam kelompok tersebut.

Dalam pemberdayaan kelompok, teori *dynamics group* atau dinamika kelompok menjadi sangat relevan. Dinamika kelompok adalah suatu proses interaksi antara anggota dalam suatu kelompok yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama (Tambas, 2018). Menurut Susetyo (2021), dinamika kelompok meliputi struktur kelompok, peran anggota, norma kelompok, serta interaksi sosial antaranggota. Semakin baik dinamika dalam kelompok, maka akan semakin besar peluang kelompok tersebut untuk berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kelompok yang memiliki struktur organisasi yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan partisipasi aktif dari anggotanya cenderung lebih adaptif dan mampu mengelola bantuan secara optimal.

Lebih lanjut, konsep *good governance* dalam pengelolaan kelompok juga sangat penting, terutama dalam konteks pengelolaan dana bantuan. Menurut Nurhidayat (2023), *good governance* mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Kelompok yang tidak memiliki mekanisme pengelolaan yang baik sering kali terjebak dalam konflik internal, penyalahgunaan bantuan, atau pembubaran kelompok. Hal ini menyebabkan anggotanya kembali menjalankan usaha secara individu dan menjauh dari tujuan awal pemberdayaan kolektif yang dirancang oleh pemerintah. Ketidakhadiran prinsip-prinsip tata kelola tersebut biasanya tercermin dari minimnya pencatatan administrasi, tidak adanya laporan pertanggungjawaban keuangan, dominasi keputusan oleh segelintir anggota, serta lemahnya komunikasi antaranggota. Dalam kondisi demikian, kelompok kehilangan kepercayaan internal, sehingga bantuan hanya bersifat konsumtif dan tidak berkontribusi pada penguatan kelembagaan.

Kenyataannya, di lapangan masih banyak dijumpai kelompok peternak yang gagal dalam mengelola bantuan yang diterima. Usaha mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan ada kelompok yang membubarkan diri karena tidak mampu mempertahankan keberlangsungan kegiatan kelompok. Bantuan yang tidak dimanfaatkan secara bijak atau menyimpang dari tujuan awal akan menyebabkan anggotanya kembali menjalankan usaha ternak secara individu, sehingga esensi dari pemberdayaan melalui kelompok menjadi hilang. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam produktivitas dan efisiensi usaha peternakan rakyat.

Apabila fenomena ini terjadi pada kelompok penerima bantuan dari dana

Pokir, maka besar kemungkinan bahwa dana tersebut tidak memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Penyebab utamanya sering kali terletak pada lemahnya tata kelola kelompok, baik dalam aspek kepemimpinan, perencanaan kegiatan, manajemen keuangan, maupun mekanisme pengambilan keputusan bersama. Ketika kelompok tidak memiliki dinamika internal yang kuat dan pengelolaan yang transparan serta akuntabel, maka potensi penyalahgunaan bantuan semakin besar, dan dampaknya akan merugikan baik pemerintah sebagai pemberi bantuan maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut sejauh mana dinamika kelompok peternak berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan pemanfaatan bantuan dari dana Pokir. Kajian ini tidak hanya membantu mengidentifikasi karakteristik kelompok yang mampu mengelola bantuan secara berkelanjutan, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan dalam merancang strategi pemberdayaan kelompok peternak yang lebih efektif dan berorientasi jangka panjang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profil kelompok penerima paket bantuan pemerintah dikota Padang.
2. Bagaimana dinamika kelompok penerima paket bantuan pemerintah dikota Padang.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk:

1. Mendeskripsikan profil kelompok penerima paket bantuan pemerintah

dikota Padang.

2. Mengetahui dinamika kelompok penerima paket bantuan pemerintah dikota Padang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang profil dan dinamika kelompok peternak penerima program bantuan serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat membantu peternak memahami cara-cara meningkatkan kerja sama dalam kelompok, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam usaha ternak serta dapat memaksimalkan bantuan yang diterima untuk peningkatan produktivitas.

##### **3. Manfaat Bagi Pemerintah**

Pedoman bagi pemerintahan untuk merancang program bantuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok peternak.